

**PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERN
DALAM MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PD PEMBANGUNAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Ahmad Khairul Rizal
NPM : 1605170405
Program Studi : Akuntansi Pemeriksaan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : AHMAD KHAIRUL RIZAL
N P M : 1605170405
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERN
DALAM MENINGKATKAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AHMAD KHAIROL RIZAL
N.P.M : 1605170405
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN
INTERN DALAM MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PD PEMBANGUNAN KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juni 2020

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khairul Rizal
NPM : 1605170405
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN" adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Khairul Rizal

ABSTRAK

Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada PD Pembangunan Kota Medan

Ahmad Khairul Rizal
Program Studi Akuntansi
Email : rizallehpad323@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* di PD. Pembangunan Medan. Mengetahui pengendalian internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* di PD. Pembangunan Medan. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal yang diterapkan oleh PD Pembangunan Kota Medan kurang efektif dalam menunjang pelaksanaan GCG, terlihat dari Auditor sudah menyusun jadwal kerja dan menentukan staf sebelum melakukan pemeriksaan dilaksanakan namun belum menyusun program audit secara spesifik. Prosedur Audit sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan efektif, terlihat dari tindakan yang di lakukan auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit hanya sebatas tugas, pokok dan fungsi saja, belum terimplementasi secara nyata sehingga belum terlihat prosedur yang memadai. Penerapan pengendalian intern terlihat masih terdapat unsur pengendalian intern piutang yang belum berjalan efektif yaitu unsur penilaian resiko. Hal ini menyebabkan piutang yang tertagih perusahaan mengalami peningkatan. Audit internal di perusahaan belum berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan GCG. Hal ini tidak terlihat dari aktivitas SPI dalam menjalankan prinsip – prinsip GCG.

Kata Kunci : *Audit Internal, Pengendalian Intern dan Good Corporate Governance*

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Drs Sunardo dan Titik Yuliasri serta ketiga kakak-kakak penulis (Ratna, Noviana dan Tri Kesuma) yang telah memberikan segala do'a,kasih sayang, perhatian, semangat dan pengorbanan baik secara materil dan immateril kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Maya Sari, SE., M.Si selaku Dosen PA yang telah membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan.
9. Bapak Riva Ubar Hrp, SE., Ak, M.Si, CA, CPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
12. Teman-teman kelas H-Akuntansi Pagi dan kelas Konsentrasi Audit Malam yang semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.

13. Kawan-kawan pejuang skripsi (Yuyun, Bimel, Leony, Haqqi , Aulia dan T.M. Rizky) yang telah memotivasi, membantu dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2020

Ahmad Khairul Rizal
1605170405

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Batasan dan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Penelitian	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Audit Internal.....	7
2.1.1.1. Pengertian Audit Internal.....	7
2.1.1.2. Kedudukan Auditor Internal.....	8
2.1.2. Pengendalian Intern	10
2.1.2.1. Pengertian Pengendalian Intern.....	10
2.1.2.2. Pentingnya Pengendalian Intern	12
2.1.2.3. Tujuan Pengendalian Intern.....	13
2.1.2.4. Unsur-Unsur Pengendalian Intern	15
2.1.3. Good Corporate Governance	17
2.1.3.1. Pengertian Good Corporate Governance.....	17
2.1.3.2. Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	18

2.1.4. Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan <i>Good Corporate Governan</i>	24
2.2. Kerangka Berfikir	26
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Teknik Analisis Data	33
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan	35
4.1.2. Kedudukan Internal Auditor	36
4.1.3. Pengendalian Intern	43
4.1.3.1. Lingkungan Pengendalian	43
4.1.3.2. Penilaian Resiko	44
4.1.3.3. Pendendalian Aktivitas	45
4.1.3.4. Pemantauan.....	46
4.1.4. Implementasi Good Corporate Governance	496
4.1.4.1. <i>Transparency</i> (Keterbukaan Informasi)	46
4.1.4.2. <i>Accountability</i> (Dapat Dipertanggungjawabkan)	47
4.1.4.3. <i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban)	47
4.1.4.3. <i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban)	49

4.1.4.5. <i>Fairness</i> (Kewajaran)	50
4.1.5. Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan GCG.....	52
4.2. Pembahasan	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi - Kisi Observasi Audit Internal	27
Tabel 3.2 Kisi - Kisi Observasi Pengendalian Intern.....	28
Tabel 3.3 Kisi - Kisi Observasi <i>Good Corporate Governance</i>	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	28
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perwujudan dari *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari peran audit internal dan pengendalian internal. Audit internal di perusahaan dapat dilihat dari Sistem Pengawasan Intern (SPI) yang berperan penting dalam pengawasan aktivitas operasional perusahaan. SPI bisa berjalan apabila *Good Corporate Governance* (GCG) dilaksanakan dengan baik dan diawasi oleh internal auditor. Fungsi internal auditor memastikan sistem pengendalian intern dengan baik yang dilakukan controler sehingga perlakuan akuntansi yang digunakan SAK itu bisa dikendalikan dengan baik.

Auditor Internal yang bertugas dalam hal pemeriksaan merupakan suatu hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian perusahaan dalam melaksanakan operasional perusahaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan suatu perusahaan adalah sangat luas, meliputi penggunaan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien. Tugas utama auditor intern adalah memastikan SPI berjalan dengan baik.

Adapun tahapan auditor internal dalam melaksanakan fungsi auditnya berdasarkan standar audit seksi 311 (SA Seksi 311) adalah : Pertama Perencanaan Audit (*Audit Planning*), beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan yaitu dengan menyusun program audit, menyusun jadwal kerja dan menentukan staf untuk pemeriksaan. Program audit meliputi sifat, luas dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai

pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada entitas yang bersangkutan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit dimana auditor sebelum melakukan pemeriksaan harus sudah menetapkan staf auditnya.

Tahapan kedua Program Audit (*Audit Program*), program kerja harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus disetujui sebelum pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus segera disetujui.

Tahapan ketiga Prosedur Audit (*Audit Procedur*) adalah tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Terdiri dari kegiatan yang mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis. Prosedur audit memiliki tahapan – tahapan yang harus dilaksanakan sedemikian rupa agar laporan hasil audit dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Prosedur audit ini meliputi Prosedur Audit Awal, Prosedur Analitik, Pengujian terhadap Transaksi Rinci.

Tahapan keempat Pengujian terhadap Akun Rinci dan Verifikasi Penyajian laporan keuangan. Kertas Kerja Audit (*Audit Working Paper*). Kertas kerja adalah catatan - catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit.

Penelitian ini dilaksanakan pada PD Pembangunan Kota Medan yang bergerak dibidang jasa dan konstruksi. Dalam menalakan aktivitasnya perusahaan di diukung oleh internal auditor, dalam hal ini menjabat misalnya Satuan Pengawasan Intern. Setelah penulis melakukan observasi awal di perusahaan yang diteliti penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan audit internal yang dilakukan diperusahaan tidak diterapkannya proses perencanaan audit (*Audit Planning*) secara menyeluruh hanya sebatas mengenai rencana kerja auditor, tidak sepenuhnya dijalankan sesuai standar. Auditor tidak secara rutin dan rinci menyusun jadwal kerja audit sehingga tidak dapat dilaksanakannya audit tepat waktu. Selain itu adanya program kerja audit yang belum jelas. Program kerja audit sehausnya harus disetujui sebelum pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus segera disetujui. Namun pada kenyataannya audit internal tidal melakukan dan menyusun program audit dengan jelas. Kondisi ini tidak sesuai dengan standar audit seksi 311 (SA Seksi 311) yang menjelaskan bahwa auditor pada tahap perencanaan yaitu dengan menyusun program audit, menyusun jadwal kerja dan menentukan staf untuk pemeriksaan yang tercermin dalam lembar kerja audit.

Disini audit internal seharusnya berfungsi membantu perusahaan dalam menilai pengendalian internalnya apakah sudah efektif dan efesien atau belum, dengan cara mengevaluasi kecukupan, efesiensi, efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Kondisi ini tentu saja mencerminkan perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang

dikemukakan oleh Sawyer's at.al (2013, hal 3) yang mengatakan bahwa :“Audit internal modern menyediakan jasa – jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko dan tata kelola (*governance*) perusahaan publik maupun privat”. Masalah yang terjadi pada GCG yaitu belum diterapkannya salah satu prinsip GCG yaitu transparansi dimana sulitnya publik untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

Pengendalian intern juga merupakan suatu hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian perusahaan dalam melaksanakan operasional perusahaan tersebut. Pengendalian yang dilakukan suatu perusahaan adalah sangat luas, meliputi penggunaan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien. Pengendalian intern harus memperhatikan secara serius karena berdampak dalam operasi perusahaan dan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Government*). Dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk memahami secara mendalam.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya suatu internal audit dan pengendalian intern dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* perusahaan maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada Pada PD. Pembangunan Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan mengidentifikasi masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Tidak diterapkannya proses perencanaan audit (*Audit Planning*) secara menyeluruh hanya sebatas mengenai rencana kerja auditor, tidak sepenuhnya dijalankan sesuai tahapan prosedurnya.
2. Belum diterapkannya salah satu prinsip GCG yaitu transparansi dimana sulitnya publik untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengendalian intern menurut COCO yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Pengendalian Aktifitas, Informasi dan Pemantauan.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* di PD. Pembangunan Medan?
2. Bagaimana pengendalian internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* di PD. Pembangunan Medan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* di PD. Pembangunan Medan.

2. Mengetahui pengendalian internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* di PD. Pembangunan Medan.

Manfaat Penelitian

Data dan informasi sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam fungsi audit internal dan pengendalian intern dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan bahan perpustakaan.
3. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan mengenai audit internal, pengendalian intern dan *Good Corporate Governance* di perusahaan.
4. Bagi pihak-pihak lain, sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, khususnya sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi mereka yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif.

2.1.1. Audit Internal

2.1.1.1. Pengertian Auditor Internal

Auditor Internal merupakan tugas auditor di dalam lingkup perusahaan yang melakukan perbaikan operasi organisasi dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Definisi pemeriksaan internal menurut Sawyer (2013, hal 21) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan internal merupakan aktivitas pemberian keyakinan objektif yang independen dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kecukupan kontrol, dan proses tata kelola”.

Menurut Hinduan (2013 hal 514), menjelaskan :

“Pemeriksaan internal (Audit Intern) adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu Organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”.

Mulyadi (2012, hal 107) mengatakan bahwa “Pemeriksaan internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, kegiatan lain yang memberikan jasa pada manajemen“.

Dari 2 (dua) pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan internal (*internal auditing*) merupakan suatu aktivitas pemeriksaan dan juga penilaian terhadap kegiatan operasi perusahaan yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan suatu alat manajemen yaitu pengendalian internal. Audit Intern tidak hanya memiliki 1 (satu) pengertian saja, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pemeriksaan internal. Salah seorang ahli yang mengemukakan pendapat lain mengenai pemeriksaan internal adalah

2.1.1.2. Kedudukan Auditor Internal

Auditor Internal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur organisasi perusahaan. Berhasil tidaknya suatu Auditor Internal dalam perusahaan sangat dipengaruhi oleh kedudukan dalam struktur organisasi perusahaan.

Menurut Hinduan (2013 hal 518) menjelaskan :

“Secara garis besar ada tiga alternatif posisi atau kedudukan dari Auditor Internal dalam struktur organisasi perusahaan yaitu:

a) Berada dibawah Dewan Komisaris

Dalam hal ini star internal auditing bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Ini disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggung jawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat diteliti oleh Auditor Internal. Dalam cara ini, bagaimanapun pemeriksaan intern sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap performance manajemen yang dimonitor oleh komisaris perusahaan. Dengan demikian bagian pemeriksa intern mempunyai kedudukan yang kuat dalam organisasi.

- b) Berada dibawah Direktur Utama
Menurut sistem ini star Auditor Internal bertanggung jawab pada direktur utama. Sistem ini biasanya jarang dipakai mengingat direktur utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berat. Jadi kemungkinan tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat Auditor Internal.
- c) Berada dibawah Kepala Bagian Keuangan
Menurut sistem ini kedudukan Auditor Internal dalam struktur organisasi perusahaan berada dibawah koordinasi kepala bagian keuangan. Bagian Auditor Internal bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala keuangan atau ada yang menyebutnya sebagai Controller. Biasanya kepala bagian keuangan tersebut bertanggung jawab pada persoalan keuangan dan akuntansi”.

Auditor Internal hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkannya untuk dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjamin kebebasannya. Hal ini berarti bahwa posisi ini diadakan untuk memberikan informasi, saran dan rekomendasi kepada manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan. Konflik antara Auditor Internal dan para manajer sering terjadi disebabkan kedua belah pihak tidak ada saling pengertian sebagaimana mestinya tentang kedudukan dan pandangan masing-masing. Para manajer menganggap para Auditor Internal mempunyai pandangan yang terlalu ketat mengenai peraturan dan penilaian transaksi-transaksi, serta bertindak sebagai penyelidik yang sering mencari keterangan tentang penyimpangan-penyimpangan kecil dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Sementara ini para Auditor Internal merasa manajer-manajer tersebut tidak memperhatikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dengan baik serta tidak mau menerima saran-saran yang diberikan.

Menurut Hinduan (2013 hal 518) menjelaskan :

“Secara garis besarnya ada tiga alternatif kedudukan Auditor Internal dalam struktur organisasi, yaitu:

- 1) Langsung bertanggung jawab pada dewan komisaris.
Hal ini banyak dilakukan dalam perusahaan-perusahaan bank dan asuransi. Dalam perusahaan-perusahaan ini Auditor Internal merupakan penjaga bagi dewan komisaris. Secara teoritis maka seluruh organisasi termasuk direktur utama dapat diteliti oleh Auditor Internal.
- 2) Bertanggung jawab pada direktur utama
Cara ini agak jarang dipakai mengingat direktur dengan tugas-tugasnya yang berat biasanya tidak mempunyai waktu untuk mempelajari laporan internal auditor dan kemudian melakukan tindakan-tindakan koreksi berdasarkan laporan tersebut.
- 3) Yang paling sering dilaksanakan adalah bahwa Auditor Internal bertanggung jawab pada fungsionaris keuangan yang tertinggi.
Fungsionaris tersebut mungkin berfungsi sebagai direktur bidang keuangan dan bendahara maupun controller. Yang penting adalah bahwa fungsionaris tersebut adalah yang bertanggung jawab atas koordinasi daripada persoalan-persoalan keuangan dan akuntansi”.

2.1.2. Pengendalian Intern

2.1.2.1. Pengertian Pengendalian Intern

Dalam pengertian yang abstrak, pengendalian (*control*) adalah proses pelaksanaan dan suatu pengaruh untuk penahanan atau untuk mengarahkan kegiatan suatu objek organisme atau sistem. Bantuan kepada manajemen dalam pengendalian organisasi perusahaan merupakan salah satu fungsi utama sistem informasi akuntansi.

Akuntan sering menggunakan istilah pengendalian intern (*internal control*) sebagai suatu sinonim untuk pengendalian di dalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian intern perlu diperhatikan. Istilahnya pertama kali didefinisikan dalam tahun 1949 oleh suatu Komite Institut Akuntan Amerika (sekarang namanya *American Institute of Certified Public Accountant* atau AICPA).

Cushing (2014, hal. 78) mengemukakan yaitu adalah sebagai berikut :

“Pengendalian intern (*Internal Control*) meliputi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan tindakan atau ukuran yang ditetapkan didalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta (kekayaannya), mencek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi dan mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen”.

Sedangkan Mulyadi (2012, hal. 171) memberikan definisi pengendalian intern adalah :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1). Keandalan pelaporan keuangan, (2). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (3). Efektivitas dan efisiensi operasi”.

Dari definisi tersebut diatas, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses, pengendalian intern suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrasutruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian

intern dan pertimbangan manfaat serta pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan pada pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi

2.1.2.2. Pentingnya Pengendalian Intern

Pengendalian intern didalam suatu perusahaan adalah penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan informasi keuangan, sehingga perlu diketahui apa itu pengendalian intern dan siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian intern dalam suatu perusahaan.

Dalam sistem akuntansi yang berbasis komputer otomatisasi banyak digunakan dalam komponen sistem. Sekali suatu data dimasukkan untuk diproses, maka akan lenyap dari daya jangkau manusia. Hal itu menutupnya pentingnya perancangan pengendalian pada umumnya akan lebih efektif bila dibangun di dalam suatu sistem jika ditambahkan setelah sistem itu diimplementasikan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mengembangkan sistem akuntansi berbasis komputer juga menghubungkan pengendalian intern di dalam sistem tersebut.

Dalam pemrosesan data secara elektronik (EDP) penanganan dokumen semakin berkurang dan keterlibatan manusia dalam pemrosesan data semakin berkurang. Hal ini menuntut metode-metode pengendalian intern untuk mendukung kebenaran informasi tersebut.

Kompleksitas suatu lingkungan komputer seperti pemrosesan *on line*, sistem komunikasi, pemrosesan data tersebut, data manajemen basis data.

(*data base management system*) dapat menimbulkan kesalahan dan kekurangan yang tak terdeteksi. Untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan pengendalian intern yang memadai pada sistem akuntansi yang terbagi komputer.

Menurut Halim (2013, hal 149) berpendapat bahwa :

“Pengendalian intern yang cukup harus di implementasikan dan dipelihara dengan alasan antara lain :

1. Untuk mencegah suatu kejadian jangan sampai terjadi, misalnya pengendalian diperlukan untuk mencegah kesalahan, kelupaan, kecurangan, *invention of privacy, key punch, an input error*, dan kesalahan proses.
2. Untuk mendeteksi suatu sesudah hal itu terjadi, misalnya ukuran pengendalian dan keamanan diperlukan untuk mendeteksi kebakaran, kesalahan, pecahnya mesin, atau kegagalan fungsi tertentu.
3. Untuk menentukan tindakan koreksi yang cocok segera sesudah sesuatu terjadi, misalnya suatu organisasi harus membuat *back up, recovery plans and contingency plans* untuk memperkecil konsekuensi kekacauan dan untuk mengejar kembali kapasitas kegiatan yang penuh.
4. Untuk memperkecil kerugian financial dari kehilangan komputer atau kerusakan fisik kekayaan.
5. Untuk memperkecil terhentinya kegiatan karena sistem yang kacau, keusangan atau bencana.
6. Untuk mengurangi tuntutan sah yang potensial karena perkara hukum akibat penanganan rekening, data atau laporan keuangan yang tidak tepat.
7. Untuk memenuhi persyaratan dari *foreign corrupt practice act of*
8. Untuk memenuhi rekomendasi yang dibuat tahun 1987 oleh *national commission on Krandellent Financial Reporting*”.

Dari dua point terakhir belum ada penerapannya di Indonesia. Kedua hal ini jelas menunjukkan bahwa pengendalian intern harus ada dalam perusahaan, sehingga perlu di atur dengan peraturan-peraturan dari pihak yang berwenang.

2.1.2.3. Tujuan Pengendalian Intern

Kerangka pengendalian dan pengamanan yang dikenal sebagai pengendalian internal. Menurut Wilkinson (2011, hal. 101) mengatakan :

“Tujuan pengendalian intern mempunyai empat tujuan besar yaitu :

1. Untuk melindungi aktiva perusahaan
2. Untuk menjamin keakuratan dan keadilan data dan informasi akuntansi
3. Untuk meningkatkan efisiensi dalam seluruh operasi perusahaan.
4. Untuk mendorong kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang tebal di gariskan manajemen”.

Keempat tujuan ini sangat besar artinya bagi manajemen para manajer harus dapat berpedoman pada informasi yang terkandung dalam laporan yang mereka terima, mereka harus menanggungjawab kas dan kas serta sarana yang dipercayakan kepada mereka dan sebagainya.

Lebih jauh lagi, perasaan manajer dewasa ini khususnya sangat mudah terganggu oleh sistem sistem pengendalian internal yang tidak memadai. Keterganguan ini diakibatkan oleh meningkatnya “resiko eksposur” (*risk exposures*) dan Pengesahan Undang-Undang “*Foreign Corrupt Practice*” (di Amerika Serikat).

Ekposur dalam konteks sistem informasi. Resiko eksposur (*Risk Exposure*) adalah resiko yang terjadi akibat hilangnya kendali. Contohnya antara lain : kekeliruan yang tidak sengaja dan pencatatan atau pemrosesan data. Hilangnya data atau aktiva fisik, pencurian aktiva, atau kesengajaan karyawan dalam meloporkan fakta secara salah (yaitu penipuan atau penggelapan) dan operasi yang tidak efisiensi serta. Serta keputusan material yang tidak efisien.

Beberapa dari eksposur ini akan timbul. Apabila para karyawan tidak dilatih atau diawasi dengan sepenuhnya, apabila mereka menjadi lelah atau ceroboh, atau apabila beberapa orang ingin memiliki harta perusahaan. Resiko eksposur lain timbul apabila elemen pemrosesan transaksi dirancang secara jelek, apabila tanggung jawab. Organisasional dilimpahkan tidak tepat atau apabila para manajer menerima informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap.

2.1.2.4. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengawasan intern pada dasarnya adalah bagian-bagian yang dibentuk mencapai tujuan pengawasan. Unsur-unsur tersebut pada dasarnya sudah cukup untuk mencapai tujuan pengawasan, asal unsur-unsur tersebut diterapkan secara baik. Unsur-unsur pendukung pengawasan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur yang utama dari struktur pengawasan internal menurut Mulyadi (2012, hal. 70) adalah :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Sistem Akuntansi
3. Prosedur Pengendalian

Berikut ini penjelasannya :

1. Lingkungan Pengendalian

Efektivitas dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian, mencerminkan sikap dan tindakan para manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian perusahaan. Efektivitas atas unsur pengendalian sangat dibutuhkan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011, par, 09) menyatakan :

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian menurut adalah :

1. Falsafah manajemen dan gaya operasinya
2. Struktur organisasi satuan usaha
3. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan.
4. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab
5. Metode pengendalian manajemen.
6. Fungsi audit intern
7. Praktek dan kebijaksanaan karyawan.
8. Pengaruh ekstern”.

2. Sistem Akuntansi

Pengertian dari pada sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang di koordinir sedemikian rupa tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan guna pengelolaan perusahaan.

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011, par, 21) menyatakan bahwa :

“Hal-hal yang perlu dipahami mengenai sistem akuntansi adalah :

1. Kelompok transaksi dalam operasi satuan usaha tersebut yang signifikan bagi laporan keuangan.
2. Bagaimana timbulnya transaksi tersebut.
3. Catatan akuntansi dokumen pendukung, informasi yang dapat dibaca komputer, akan masuk dalam laporan keuangan yang terkait dalam pengolahan data.
4. Pengolahan akuntansi yang terkait sejak awal suatu transaksi sampai dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk bagaimana komputer digunakan dalam pengolahan data.
5. Proses pelaporan keuangan yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan satuan usaha termasuk estimasi akuntansi yang signifikan dan pengungkapannya”.

3. Prosedur Pengendalian

Kebijaksanaan dan prosedur sebagai tambahan atas lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat tercapai.

Menurut Arens and Lasbecke (2014, hal. 310) mengatakan :

“Prosedur pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur menurut yang umumnya dapat digolongkan ke dalam lima kelompok, yaitu :

1. Pemisahan tugas yang cukup
2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
5. Pengecekan independen atas pelaksanaan”.

Ditinjau dari segi pengendalian adalah perlu diketahui bagaimana penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya dan dibandingkan dengan taksirannya. Selain membandingkan aktiva kas yang sebenarnya dengan taksirannya, adalah berguna juga untuk membandingkan dengan secara periodik, saldo menurut buku dan jumlah saldo yang diperlukan untuk memenuhi beban jasa bank dan saldo yang diwajibkan. Laporan seperti itu membandingkan “*objektive balance*” (saldo sasaran) dengan saldo buku yang sebenarnya. Jenis laporan itu memberikan sarana untuk pengecekan periodik mengenai penggunaan kas secara efektif dengan mencatat :

1. Tidak adanya saldo yang berlebihan,
2. Adanya saldo bank yang cukup untuk mengkompensasi lembaga keuangan tersebut.

2.1.3. Good Corporate Governance

2.1.3.1. Pengertian Good Corporate Governance

Salah satu lingkup tugas Aktivitas Audit Internal adalah tata kelola (*Governance*), di samping pengendalian internal dan manajemen risiko. Tapi yakinkah kita, bahwa rata-rata auditor internal di Indonesia telah meng-*address* lingkup tugas yang satu ini dengan memadai. Dalam daftar istilah IPPF,

tata kelola didefinisikan sebagai kombinasi proses dan struktur yang diimplementasikan oleh *Board* untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan-kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya. Lebih lanjut, pada Standar 2110 digariskan peran Aktivitas Audit Internal untuk menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan-tujuan berikut:

- 1) Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi;
- 2) Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif;
- 3) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-bidang yang sesuai di dalam organisasi dan
- 4) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara *Board*, auditor internal dan eksternal, serta manajemen (FCGI, 2012).

Sayangnya, sampai dengan saat ini IIA belum mengeluarkan *practice advisory* yang memberikan pedoman lebih lanjut pelaksanaan standar ini.

Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* (selanjutnya disebut sebagai CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. BEI sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global. Penerapan komitmen CG yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) terkandung pada misi Perusahaan yaitu menciptakan daya

saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*

2.1.3.2. Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Setelah definisi serta aspek penting GCG terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Menurut Susilo (2007), menyatakan “GCG menggunakan prinsip-prinsip yang disebut TARIF yang merupakan akronim dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*”.

Berikut ini penjelasan dari prinsip-prinsip GCG tersebut.

a. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi

keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

b. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan

Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- 1) Praktek Audit Internal yang Efektif, serta
- 2) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”**. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat sertifikat ini, dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen).

Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin, yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal bagi pemegang saham.

- 2) **Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum.** Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.

d. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian, adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas. Dapat dikatakan prinsip akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggung jawaban dan prinsip kemandirian.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness*

juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain. Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip *fairness*, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa dipetik.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan

atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

2.1.4. Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan

Good Corporate Governance

Peran audit internal yang independen sangatlah penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor tidak mempunyai hubungan dengan direksi, memiliki keterampilan dan keahlian audit yang sesuai standar profesi serta memiliki intuisi dalam melaksanakan pekerjaan akan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Sawyer's et.al (2013, hal 3) menjelaskan bahwa :“Audit internal modern menyediakan jasa – jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko dan tata kelola (*governance*) perusahaan publik maupun privat.

Audit internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses *governance* (SPAI, 2004:9) di kutip dari Widya (2017).

Lebih lanjut Mulyadi (2012) mengatakan bahwa :“Pemeriksaan internal (internal Audit) merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, kegiatan lain yang memberikan jasa pada manajemen“. Auditor internal akan mendukung terciptanya perusahaan yang *governance* apabila dalam melaksanakan perannya dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan secara *accountable*.

Pengendalian intern yang baik akan dapat memperbaiki proses dan prosedur kerja dalam manajemen sehingga dapat terwujud GCG yang efektif. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengendalian yang baik maka manajemen akan bekerja dengan maksimal sehingga terwujudlah tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Untuk itu perusahaan sangatlah penting dapat menerapkan pengendalian intern yang efektif guna memastikan lini kerja dalam manajemen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing –masing manajemen.

Chusing (2014, hal 197) menyatakan :

Peran dari pengendalian intern adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya *good corporate governance (GCG)* serta terwujudnya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.

2.2. Kerangka Berfikir

Masalah yang sering terjadi adalah bagaimana audit internal dan pengendalian intern mampu meningkatkan *Good Corporate Governance* di perusahaan. Untuk itu diperlukan fungsi audit internal dan pengendalian intern yang baik, agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai visi dan misi perusahaan.

Fungsi audit internal menjadi alat yang efektif untuk menilai dan mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik yang memenuhi prinsip – prinsip GCG yaitu pertanggungjawaban, akuntabilitas, kemanidrian dan kewajaran.

Pengendalian intern, dengan dukungan teknologi informasi, telah menjadi komponen penting dalam organisasi bisnis modern yang sukses menjalankan usahanya, karena mampu membantu dalam pengembangan bisnis dan mengelola keunggulan kompetitif. Sistem pengendalian intern juga diandalkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses bisnis yang ada di organisasi, sehingga menjadi proses bisnis unggulan (*best practice*), juga mampu memfasilitasi jajaran manajer dalam pengambilan putusan dan kolaborasi antar bagian yang dapat tercipta GCG dengan efektif.

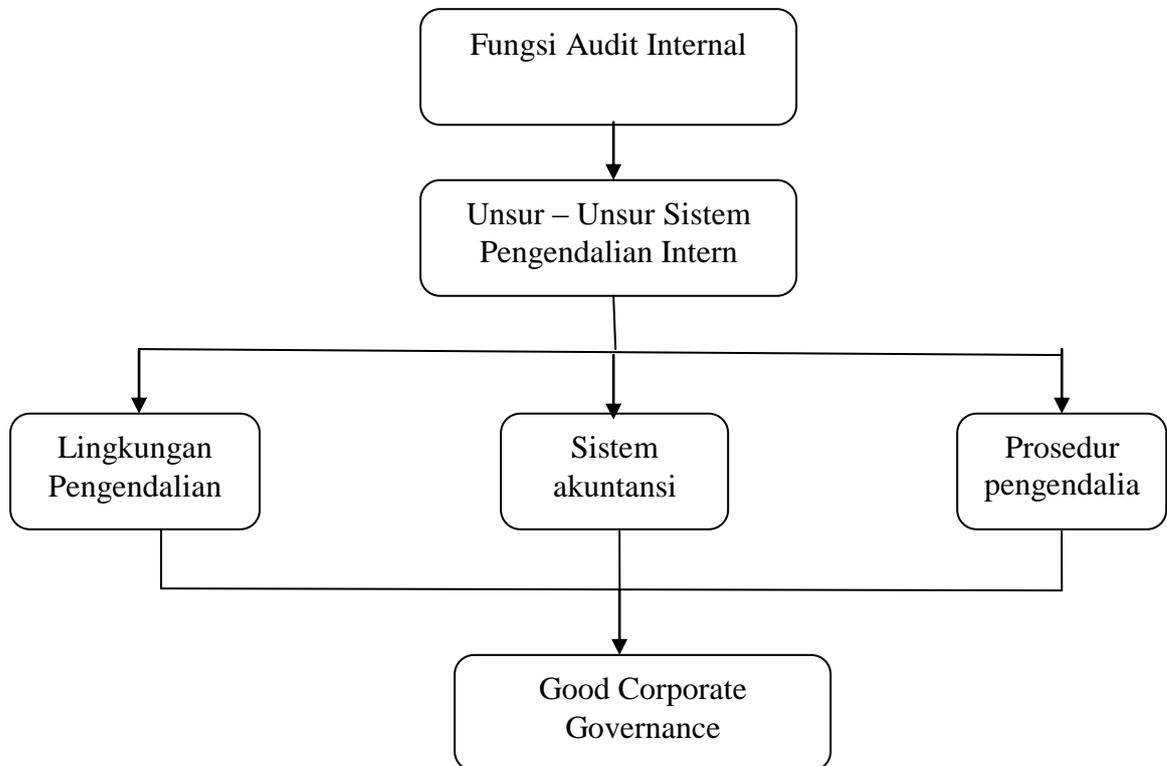
Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat,

maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya fungsi audit internal dan pengendalian internal yang baik dan efektif serta terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Fungsi audit internal yang efektif dan Pengendalian intern harus seiring dalam pelaksanaannya. Apabila fungsi audit internal dan pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, akhirnya akan mengakibatkan tata kelola perusahaan yang buruk. *Governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan.” Namun tampaknya secara umum di kalangan pebisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan, meskipun masih rancu dengan terminologi manajemen. Masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasan Indonesia yang benar. Kemudian, “GCG” ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Berikut ini kerangka berfikir dalam menjelaskan alur penelitian sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013, hal 11) “Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”.

3.2. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Audit Internal

Audit Internal merupakan aktivitas pemberian keyakinan objektif yang independen dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kecukupan kontrol, dan proses tata kelola. Adapun kisi-kisi instrumen analisis Audit Internal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III-1. Kisi – Kisi Observasi Audit Internal

No.	Komponen	Instrumen
1	Perencanaan Audit	Wawancara
2	Program Audit	Wawancara
3	Prosedur Audit	Wawancara

3.2.2. Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang diupayakan untuk mengoreksi dan mengevaluasi kegiatan atau transaksi bisnis, agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan menghindari agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta penyelewengan-penyelewengan atas transaksi yang ada dalam perusahaan. Adapun kisi-kisi instrumen analisis pengendalian intern dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III-2. Kisi – Kisi Observasi Pengendalian Intern

No.	Komponen	Instrumen
1	Lingkungan pengendalian	Wawancara
2	Sistem akuntansi	Wawancara
3	Prosedur pengendalian	Wawancara

3.2.3. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya. Adapun kisi-kisi instrumen analisis *Good Corporate Governance* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III-3. Kisi – Kisi Observasi *Good Corporate Governance*

No.	Komponen	Instrumen
1	<i>Transparency</i>	Wawancara
2	<i>Accountability</i>	Wawancara
3	<i>Responsibility</i>	Wawancara
4	<i>Independency</i>	Wawancara
5	<i>Fairness</i>	Wawancara

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan memilih salah satu bidang yang ada pada perusahaan kemudian mencoba membahasnya atas dasar teori-teori yang pernah dipelajari oleh penulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari laporan manajemen perusahaan yang diperoleh dari PD. Pembangunan Medan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*).

a. Wawancara.

Yaitu teknik yang dilakukan penulis dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini, penulis menghubungi beberapa bagian dalam PD. Pembangunan Medan, yaitu :

1. Bagian Audit Internal.

2. Bagian Personalia.

b. Observasi.

Yaitu dengan mengadakan langsung penelitian kelapangan atas aktivitas perusahaan khususnya yang berhubungan dengan objek

penelitian. Hasil penelitian ini, dijadikan dasar penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penulis dalam mengakumulasikan dan menganalisa data berdasarkan teori-teori yang penulis dapatkan di bangku-bangku kuliah beserta literatur-literatur lainnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan objek yang diteliti.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti. Untuk itu penulis melakukan analisis dengan cara menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun tahapan analisisnya adalah :

1. Melakukan wawancara langsung kepada bagian operasional perusahaan dan SPI guna mendapatkan informasi yang relevan.
2. Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas SPI
3. Mendeskripsikan temuan penelitian dan mengkaitkan dengan teori
4. Menyimpulkan hasil penelitian dan membangun saran penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

PD Pembangunan Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/784/SK/ Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 Tentang pembentukan PD Pembangunan Kota Medan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun 2001 tentang pembentukan PD Pembangunan Kota Medan. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan PD Pembangunan Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor /SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 tahun 1997 jo, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Pembangunan Kota Medan.

Bidang usaha PD Pembangunan Kota Medan memiliki lingkup jasa konstruksi, properti, sarana umum, perhotelan, pergudangan dan pariwisata. Saat ini mengelola unit usaha taman margasatwa medan (medan zoo), pergudangan kota tanjung mulia (pktm), kolam renang deli, gelanggang remaja dan rumah susun amplas.

Tugas Pokok :

- Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan.
- Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi :

- Menyusun dan melaksanakan program jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan;
- Menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan gedung, konstruksi jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan kegiatan hiburan;
- Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah dan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

4.1.2. Kedudukan Internal Auditor

Kedudukan internal audit pada PD Pembangunan Kota Medan dijabat oleh Satuan Pengawasan Intern. Namun apapun nama dari divisi internal auditor itu tidak menjadi masalah, karena pada dasarnya fungsi dan tanggung jawab dari Satuan Pengawasan Intern tersebut sama dengan internal auditor yaitu sebagai pemeriksa yang berasal dari staf perusahaan yang fungsi utamanya untuk menilai

sistem pengendalian intern perusahaan sudah berjalan dengan baik sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern pada PD Pembangunan Kota Medan berada di bawah Direktur Utama yaitu (Direktur keuangan, Direktur Pengembangan dan Direktur Operasional). Satuan Pengawasan Intern pada PD Pembangunan Kota Medan bukan merupakan fungsi operasional karena ia tidak terlibat dalam kegiatan utama perusahaan seperti pembelian bulanan, pemasaran dan sebagainya, tetapi bagian ini berfungsi sebagai staf perusahaan. Tanggung jawabnya hanyalah sebagai konsultan yang berkewajiban memberikan nasehat yang paling baik, sedangkan untuk mengambil keputusan tetap berada ditangan pimpinan. Kedudukan Satuan Pengawasan Intern dalam struktur organisasi perusahaan berada di bawah Direktur Utama dengan demikian Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama, menerima instruksi dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur Utama.

4.1.3. Tahapan Pelaksanaan Audit

4.1.3.1. Perencanaan Audit (*Audit Planning*)

Bagian terpenting dari suatu proses Audit yang baik adalah memiliki Jadwal Audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang (biasanya jadwal tahunan). Hal ini dapat memungkinkan pemilik proses untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor

untuk fokus membantu mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan *improvement* di area lainnya. Pada tahapan ini SPI selaku audit internal di perusahaan tidak diterapkannya proses perencanaan audit (*Audit Planning*) secara menyeluruh hanya sebatas mengenai rencana kerja auditor yang dilakukan satu tahun sekali. Seharusnya SPI akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana Proses Audit akan dilakukan secara rinci dan lengkap. Risiko kerja juga dapat dilakukan oleh tim Audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama Proses Audit dilaksanakan. Dan kemudian, Auditor akan menyusun rencana audit sesuai *workshop* atau diskusi yang sudah dilakukan oleh tim Audit. Apabila tahapan ini sudah dilaksanakan dengan efektif maka tahapan selanjutnya akan dapat berjalan efektif pula.

4.1.3.2. Program Audit (*Audit Program*)

Tahapan selanjutnya yang dilakukan SPI adalah mengambil informasi yang dikumpulkan dari Rapat Terbuka dan menggunakannya untuk merealisasikan Rencana Audit. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan audit internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menetapkan Tim Auditor Internal dengan memperhatikan bahwa Staf pada bagian yang diaudit tidak ditunjuk sebagai Auditor pada bagian tersebut. Membuat dan mengesahkan Surat Tugas pelaksanaan audit internal. Kerja Lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau Prosedur dan Proses Audit. SPI akan menguji kepatuhan anggota organisasi perusahaan terkait pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Kontrol internal dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut benar-benar dijalankan secara reliabel dan

memadai. SPI akan mendiskusikan suatu masalah saat masalah tersebut muncul kepada manajemen perusahaan untuk memberi kesempatan memberikan *feedback*.

4.1.3.3. Prosedur Audit (*Audit Procedur*)

Prosedur Audit sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan efektif karena belum memiliki prosedur yang jelas sehingga menyulitkan dalam proses audit. Pada tahapan ini prosedur diawali oleh tim audit yang di koordinasi oleh Reza selaku koordinator tim audit dengan membuka kegiatan Audit Internal (opening). Ketua Tim Auditor memperkenalkan peserta serta konfirmasi penjadwalan audit. Tim audit melaksanakan audit sesuai dengan jadwal dan lingkup yang telah ditetapkan. Kegiatan audit harus selesai pada waktu yang telah dijadwalkan dan telah ditulis tindaklanjutnya. Melakukan rapat auditor yang dipimpin oleh Ketua Tim Auditor yang berisi tentang laporan temuan dari masing-masing auditor. SPI harus meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait kebutuhan Audit sehingga prosedur audit dapat berjalan dengan efektif. Bahkan seharusnya SPI sudah mengirimkan daftar dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu kepada setiap bagian di perusahaan ke dalam *Audit Checklist*. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup salinan Laporan Audit sebelumnya, rekening koran, nota keuangan, dan buku besar. Tahapan akhir adalah membuat laporan temuan audit beserta tindaklanjutnya yang telah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee, serta menyerahkan laporan asli kepada Kepala Bidang /Kepala Bagian terkait.

4.1.4. Pengendalian Intern

Pengendalian intern menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan pengendalian intern yang efektif. Berikut ini analisa hasil penelitian berkaitan dengan pengendalian intern di PD Pembangunan kota Medan yang dikaitkan dengan standar COSO.

4.1.4.1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi komponen pengendalian yang lain. Untuk mencapai pengendalian intern yang baik maka lingkungan pengendaliannya pun harus baik pula. Semua personel menyadari bahwa lingkungan pengendalian di PD Pembangunan kota Medan menciptakan suasana pengendalian dalam organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Adapun hal-hal yang menjadi faktor yang membentuk lingkungan pengendalian meliputi :

a. Nilai Integrasi dan Etika.

Nilai integrasi dan etika dan kejujuran para karyawan merupakan salah satu aspek yang penting diperusahaan selain itu juga perusahaan menetapkan disiplin kerja yang harus dipatuhi oleh karyawan. Disiplin kerja yang berlaku dalam perusahaan dinyatakan dalam kesepakatan sebagai berikut :

1. Menetapkan masuk kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 17.00 yang dimulai dengan mengisi daftar hadir yang telah tersedia.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

3. Selama jam kerja karyawan berada ditempat kerja, kecuali mendapat izin dari atasan yang berwenang.
4. Memakai dan mematuhi prosedur kerja, petunjuk kerja atau instruksi dari atasan yang berwenang sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

PD Pembangunan kota Medan memiliki berbagai macam kode etik baik didalam lingkungan perusahaan sendiri maupun lingkungan luar. Selain itu perusahaan juga memiliki sistem *reward* (penghargaan) dan sistem *punishment* (sanksi). Bagi karyawan yang berprestasi dalam hal loyalitas, dedikasi dan disiplin akan diberi predikat sebagai karyawan teladan dengan mendapat penghargaan yaitu imbalan materi berupa kenaikan gaji istimewa, sedangkan apabila terdapat karyawan yang melanggar disiplin kerja akan diberikan sanksi.

4.1.4.2. Penilaian Resiko

Kegiatan pencatatan dan penagihan piutang PD Pembangunan kota Medan tidak menetapkan risiko yang mungkin timbul dari kegagalan. Oleh karena itu maka sangatlah penting untuk melakukan kajian-kajian secara professional untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin terjadi dari perubahan keadaan sebagai berikut:

- a) Seharusnya pola bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur-prosedur yang baru harus dapat ditaksir.
- b) Adanya perubahan standar kualitas harus dapat di antisipasi pada lini manajemen.
- c) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi haruslah dapat di antisipasi.

d) Pertumbuhan ekonomi yang cepat harus dapat membuat perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

Penaksiran risiko itu ditujukan agar sasaran kepatuhan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan risiko terjadinya kegagalan penerimaan kredit dapat ditekan seminimal mungkin.

4.1.4.3. Pendendalian Aktivitas

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuannya. Aktivitas pengendalian yang diterapkan pada PD Pembangunan kota Medan adalah sebagai berikut :

Pembagian Tugas yang memadai.

Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tugas kegiatan pokok perusahaan, tujuan pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah kesalahan dan agar dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada seseorang. PD Pembangunan kota Medan telah menerapkan pemisahan fungsi pengendalian yang cukup memadai. Prosedur otorisasi yang pantas atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didalam suatu organisasi.

Setiap kegiatan hanya terjadi atas dasar otorisasi yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya kegiatan tersebut. Oleh karena itu harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk diotorisasi atas terlaksananya setiap

transaksi. Prosedur tersebut dilakukan oleh PD Pembangunan kota Medan dalam melakukan proses pengendalian dalam setiap penyaluran kredit.

Pengecekan independensi atas pelaksanaan kegiatan

Satuan pengawasan intern melakukan pemeriksaan atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern serta melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagai fungsi manajemen.

4.1.4.4. Pemantauan

Kegiatan manajemen PD Pembangunan kota Medan selalu melakukan pemantauan terhadap segala kegiatan dalam transaksinya. Hal tersebut dipandang perlu agar manajer dapat menganalisis mengenai perencanaan yang disusun perusahaan apakah telah dilaksanakan dengan baik dan manajemen juga dapat terus mengadakan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi.

4.1.5. Implementasi Good Corporate Governance

Pelaksanaan GCG di PD Pembangunan kota Medan belum memiliki komitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik. Berikut ini penilaian indikator GCG pada PD Pembangunan kota Medan.

4.1.5.1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan belum menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan tidak dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan

berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para stackholder tidak dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Transparansi informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional PD Pembangunan kota Medan tidak disajikan secara berkala setiap triwulan dan disampaikan kepada stakeholders melalui surat kabar yang cukup informatif, maupun dalam buku Laporan Tahunan (*Annual Report*).

4.1.5.2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur utama pelaksana tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur organisasi ini lebih menekankan pada aspek pengawasan, pelayanan, pemasaran, efektivitas/efisiensi melalui pemantapan *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, *Risk Culture*, dan *Corporate Culture* dengan berorientasi kepada pelaksanaan *core bussiness* utama PD Pembangunan kota Medan Sumut sebagai perusahaan daerah yang semestinya memiliki laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.5.3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diatur dalam Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PD Pembangunan kota Medan Sumut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur. Dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban, pihak PD Pembangunan kota Medan harus menerapkan fungsi kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

4.1.4.4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian, adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip ini telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan dimana seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), khusus untuk Komisaris Independen dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani diatas materai. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lainnya dan/ atau Direksi PD Pembangunan kota Medan.

4.1.5.5. *Fairness* (Kewajaran)

Fairness yang diterapkan perusahaan diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Untuk menerapkan *fairness* yang baik, maka pihak PD Pembangunan kota Medan Sumut menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Penerapan ini diterapkan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko sesuai Ketentuan yang berlaku
- b Pelaksanaan GCG pada PD Pembangunan kota Medan Sumut telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai salah satu tuntutan GCG yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko, mengevaluasi kinerja manajemen risiko dan sistem pengawasan intern, serta memberikan informasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah-langkah dalam hal mengantisipasi risiko.
- c Dewan Komisaris belum menyetujui diterbitkannya Buku Pedoman Manajemen Risiko yang merupakan panduan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko secara komprehensif.
- d Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi, analisa dan review terhadap Laporan Profil Risiko secara berkala serta menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut apabila diperlukan.
- e Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- f Dewan komisaris bersama Direksi telah melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja PD Pembangunan kota Medan Sumut dalam hal memberikan pembelajaran mengenai pengembangan budaya risiko.

- g Direksi telah menyetujui kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan berupa Buku Pedoman Perusahaan dan Surat Edaran yang menjadi pedoman bagi seluruh risk taking unit dalam mengelola risiko.
- h Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi-transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain dalam bidang kredit melalui *loan commitee*.
- i Direksi telah memastikan independensi fungsi Manajemen Risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
- j Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen Risiko sehingga proses tersebut sesuai dengan kebutuhan terkini.

4.2. Pembahasan

Pada PD Pembangunan Kota Medan internal auditor menerima penugasan dari Direktur Utama dan mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama, berarti wewenang yang dimilikinya untuk memeriksa dan meminta informasi langsung kepada objek yang diperiksanya lebih luas serta dapat bertindak lebih tegas dalam pemeriksaannya.

Berdasarkan wewenang yang diberikan pimpinan, internal auditor berhak mengadakan pemeriksaan terhadap masing-masing satuan administrasi, dimana pemeriksaan yang dimaksudkan sebagai tindakan pengawasan terhadap administrasi guna usaha mencegah penyalahgunaan kekayaan perusahaan yang dituangkan ke dalam bentuk laporan kepada Direktur Utama.

Menurut penulis kedudukan internal auditor yang berada langsung di bawah Direktur Utama sangat baik karena internal auditor mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugasnya, karena kebebasan merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh internal auditor agar pelaksanaan audit intern berfungsi dengan baik.

4.2.1 Audit Internal

Hasil observasi secara keseluruhan pada Peranan Audit Internal dapat disimpulkan bahwa peranan audit internal yang diterapkan oleh PD Pembangunan Kota Medan kurang efektif dalam menunjang pelaksanaan GCG. Hal ini dapat dilihat dari penilaian indikator Peranan Audit Internal yaitu :

a. Perencanaan Audit

Perencanaan audit sudah dilakukan namun belum terlihat maksimal dan efektif. Hal ini terlihat dari hasil wawancara narasumber berkaitan dengan jadwal auditor. Auditor sudah menyusun jadwal kerja dan menentukan staf sebelum melakukan pemeriksaan dilaksanakan namun auditor belum menyusun program audit yang meliputi sifat, luas dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan. Menyusun draft program Audit Internal pada awal tahun kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan audit, pembahasan draft program audit internal belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku serta tidak dilakukannya pendistribusian program Audit Internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori dari standar audit seksi 311 (SA Seksi 311) yang menjelaskan bahwa auditor pada tahap perencanaan yaitu harus menyusun program audit, menyusun jadwal

kerja dan menentukan staf untuk pemeriksaan yang tercermin dalam lembar kerja audit.

b. Program Audit

SPI sudah melakukan dan mengambil informasi yang dikumpulkan dari Rapat Terbuka dan menggunakannya untuk merealisasikan Rencana Audit. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan audit internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menetapkan Tim Auditor Internal dengan memperhatikan bahwa Staf pada bagian yang diaudit tidak ditunjuk sebagai Auditor pada bagian tersebut. Membuat dan mengesahkan Surat Tugas pelaksanaan audit internal. Kerja Lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau Prosedur dan Proses Audit.

c. Prosedur Audit

Prosedur Audit sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan efektif. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit hanya sebatas tugas, pokok dan fungsi saja, belum terimplementasi secara nyata sehingga belum terlihat prosedur yang memadai. Namun, prosedur audit sudah terlihat baik dari segi auditor dalam melakukan Prosedur Analitik sudah memastikan bukti atau dokumen transaksi yang otentik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori dari (Mulyadi: 2002) yang menyatakan bahwa prosedur audit harus dibuat dalam suatu daftar prosedur audit seluruh audit unsur tertentu. Dengan kata lain, prosedur audit tersebut berisikan kumpulan instruksi-instruksi rinci yang

harus dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan proses auditnya guna memperoleh bukti audit yang diperlukan.

SPI seharusnya menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi misalnya antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Melakukan rekonsiliasi ini penting agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang andal.

Dalam melakukan pemeriksaan internal auditor tidak mengadakan perencanaan, terlihat dari belum adanya target dan prosedur kerja audit. Seharusnya SPI mampu menyiapkan perencanaan pemeriksaan secara matang dan kompleks karena untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal diperlukan suatu perencanaan yang matang. Dalam prakteknya pada perusahaan, penetapan rencana pemeriksaan juga belum merupakan langkah awal sebelum pemeriksaan dilakukan. Perencanaan yang ditetapkan sebelumnya belum dituangkan dalam program kerja tahunan. Maksud dari program kerja tahunan ini adalah bahwa pemeriksaan dilakukan oleh internal auditor setiap setahun sekali, dan untuk tahun berikutnya sama dengan tahun sebelumnya.

4.2.2. Pengendalian Intern

Hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern, yaitu secara umum sistem pengendalian intern di PD Pembangunan Kota Medan belum terlihat efektif karena belum sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern COSO yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktifitas, informasi dan pemantauan.

Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kesesuaian dengan teori Sistem pengendalian intern COSO menurut Arens dan Loebbecke (2012, hal 293) menekankan kepada lima unsur pengendalian intern yaitu Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*), Penilaian Risiko (*Risk Valuation*), Pengendalian Aktifitas (*Activity Control*), Informasi (*Information*) dan Pemantauan (*Monitoring*). Namun masih terdapat unsur pengendalian intern piutang yang belum berjalan efektif yaitu unsur penilaian resiko. Hal ini menyebabkan piutang yak tertagih perusahaan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sandi Kurnia (2009) yang menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian intern perusahaan yang dilaksanakan sudah cukup baik dan teratur dengan rapi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kejanggalan dan kekeliruan. Dimana para pihak penagih belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern dalam penetapan resiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena masih kurangnya menerapkan prosedur pencatatan atas kwitansi-kwitansi tersebut khususnya atas piutang yang belum dibayar pada setiap saat. Sedangkan dalam hal pelaporan piutang, perusahaan sudah cukup jeli.

4.2.3. Implementasi Good Corporate Governance

Hasil penelitian ini menuukkan bahwa pelaksanaan GCG di PD Pembangunan kota Medan belum memiliki komitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik. Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, seharusnya perusahaan dapat melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku pada prinsip – prinsip GCG, maka Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan seharusnya memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PD Pembangunan kota Medan belum memiliki kebijakan dan ketentuan yang mengatur Tata Kelola Perusahaan yang lengkap melalui Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai dasar dalam melaksanakan penerapan GCG dimaksud. Selain itu ditemukan belum adanya buku pedoman sebagai pendukung dalam pelaksanaan penerapan GCG, yaitu :

- a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
- b) Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)
- c) Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*)
- d) Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter)
- e) Pedoman Komite Pemantau Risiko
- f) Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan dan ketentuan tersebut belum didistribusikan kepada unit kerja sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan penerapan GCG pada seluruh unit kerja PD Pembangunan kota Medan. Untuk pemahaman dan persepsi yang sama telah dilakukan sosialisasi pelaksanaan penerapan GCG kepada pemegang saham, rekanan/mitra bisnis, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai di setiap lini organisasi. Dengan mempedomani buku-buku tersebut diatas dan

sosialisasi yang dilakukan, maka seharusnya diharapkan seluruh unit kerja dapat mempraktekkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan operasional.

4.2.4. Peranan Adit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan GCG

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit internal di perusahaan belum berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan GCG. Hal ini tidak terlihat dari aktivitas SPI dalam menjalankan prinsip – prinsip GCG. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sawyer's at.al (2013, hal 3) menjelaskan bahwa :“Audit internal modern menyediakan jasa – jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko dan tata kelola (*governance*) perusahaan publik maupun privat.

Seharusnya Audit internl merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, emlalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses *governance* (SPAI, 2004:9).

Lebih lanjut Mulyadi (2012) mengatakan bahwa :“Pemeriksaan internal (internal Audit) merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, kegiatan lain yang memberikan jasa pada manajemen“. Auditor internal akan mendukung terciptanya perusahaan yang *governance* apabila dalam melaksanakan perannya dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan secara *accountable*.

Sedangkan pengendalian intern sudah cukup efektif dalam mewujudkan GCG. Hal ini terlihat dari indikator pengendalian intern menurut COSO yang sudah dijalankan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Chusing (2014, hal 197) bahwa peran dari pengendalian intern adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya *good corporate governance (GCG)* serta terwujudnya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil analisis mengenai peran audit internal dan pengendalian intern dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PD Pembangunan Kota di Medan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peran audit internal belum efektif dalam menciptakan pengendalian intern dan peningkatan tata kelola perusahaan (GCG). Hal ini terlihat dari beberapa fungsi audit internal yang belum berjalan dengan baik. Kedudukan internal auditor yang berada langsung di bawah Direktur Utama sangat baik karena internal auditor mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugasnya, karena kebebasan merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh internal auditor agar pelaksanaan audit intern berfungsi dengan baik. Program kerja pemeriksaan tahunan ini belum ditetapkan oleh pimpinan yang di dalamnya seharusnya mencakup objek pemeriksaan yang akan diperiksa, waktu pelaksanaan pemeriksaan, staf pemeriksa yang bertugas serta dana yang dibutuhkan. Pada setiap akhir pemeriksaannya, Satuan Pengawasan Intern (internal auditor) wajib menyusun laporan hasil pemeriksaannya, yang secara umum memuat hasil temuan pemeriksaannya, kesimpulan saran dan secara konstruktif. Pada PD Pembangunan Kota Medan tidak diketahui laporan audit intern atas

pemeriksaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Intern di perusahaan masih sangatlah lemah.

2. Secara umum sistem pengendalian intern di PD Pembangunan Kota Medan belum cukup baik karena belum sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern COSO yang mencakup Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*), Penilaian Risiko (*Risk Valuation*), Pengendalian Aktifitas (*Activity Control*), Informasi (*Information*) dan Pemantauan (*Monitoring*). Hal ini terlihat dari ada beberapa unsur pengendalian intern yang harus diperbaiki karena masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu dari unsur penaksiran resiko. Lingkungan pengendalian PD Pembangunan Kota Medan belum efektif hal ini terlihat dari belum adanya tindakan, kebijaksanaan, dan prosedur yang dilakukan perusahaan dalam menilai pengendalian internnya. Pengendalian resiko oleh manajemen perusahaan belum efektif, dimana terlihat dari adanya kerugian perusahaan setiap tahunnya. Artinya perusahaan belum benar-benar menetapkan resiko yang jeli terhadap laporan keuangannya.
3. Tata kelola perusahaan belum diterapkan dengan baik dimana penerapan *Good Corporate Governance* belum sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan undang-undang mengenai perseroan di Indonesia. Pelaksanaan GCG di PD Pembangunan kota Medan belum memiliki komitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyimpulkan hasil analisis, maka penulis akan mencoba memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan pula kepada perusahaan agar hendaknya auditor internal dapat lebih meningkatkan efektivitas pengendalian laporan keuangan ditinjau dari segi elemen-elemen *internal control*. Auditor internal perusahaan melakukan pelatihan dalam bidang audit yang lebih mendalam guna dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian auditor dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
2. Disarankan kepada perusahaan agar perlu ditunjang oleh adanya aktivitas pengendalian internal yang sesuai dengan prinsip COSO, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang penyajian informasi keuangan yang memadai.
3. Hendaknya perusahaan melaksanakan penerapan *good corporate governance* secara efektif dan konsisten agar pelaksanaan tata kelola perusahaan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A., and Loebbecke, James K. (2014). *Auditing an Integrated Approach*, 8th edition, Prentice Hall Inc: Englewood, New Jersey.
- Baihaqi Ammy (2016), Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Jurnal Ilmiah Maksitek Vol.I No. 1*. Dosen Fakultas Ekonomi UMSU.
- Bambang Hartadi (2015), *Sistem Pengendalian Intern*, Edisi Kedua, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- COSO, 2015. *Internal Control Integrated Frame Work, edition in two volumes, Committee Of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision*, July.
- Cushing, Barry E, (2014), *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*, Edisi Ketiga, Terjemahan Ruchyat Kosasih, Jakarta : Erlangga.
- M. Fahmi dan M. Ridho Syaputra (2019), Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*.
- FCGI (2012), *Standar Penerapan Good Corporate Governance*.
- Halim, Abdul. (2013), *Bunga Rampai Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Heckert, Jhon. B. Campbell, (2013), *Controllershship : Tugas Akuntan Manajemen*, Terjemahan Gunawan Hutahuruk, Edisi Ketiga, Jakarta : Erlangga.
- Hinduan (2013), *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*, Indeks, Jakarta.
- Iktan Akuntansi Indonesia (2011), "Standar Profesi Audit Internal". Jakarta : Salemba Empat.
- Maya Sari (2012), Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis UMSU*.
- Mulyadi (2012), *Sistem Akuntansi*, Edisi KETiga, Cetakan Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Radiman dan Sri Fitri Wahyuni (2019), Pengaruh Good Corporate Governance Dancorporate Social Responsibility Terhadapprofitabilitas (Return On

Equity) Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *SAMBIS 2019*. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Sawyer's et al (2013), *Modern Internal Auditing*, Fourth Edition, New York: A. Ronald Press Publication.

Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV. Alfabeta.

Susilo (2007), *Aspek – Aspek Good Corporate Governance*. Jakarta : CV. Media Pratama.

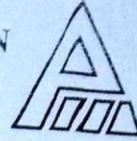
Widya Astuty (2017), Peran Internal Auditor Sebagai Watchdog, Consultant & Challenger.. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis UMSU*.

Wilkinson, Joseph. W, (2011), *Sistem Akuntansi dan Informasi*, Terjemahan Marianus Sinaga, Jakarta : Erlangga.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
 JASA KONSTRUKSI - PROPERTI - SARANA UMUM & PARIWISATA
 JLN. SUTOMO UJUNG NO. 2-4 TELP. 061.4150064 - 061.4511974
 FAX : 061 - 4574353, E-MAIL : pd.pembangunanmedan@gmail.com
 MEDAN 20235



Medan, 18 September 2019

Nomor: 032 / 027 / PDPKM / IX / 2019

Lamp : - -

Hal : **Pembelian Obat Gusanex**

Kepada :

✓ Kepala Unit/Manager
 Taman Margasatwa Medan

di -

Medan

1. Menindaklanjuti surat Saudara No.561/01/PDPKM-TMM/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Hal : Mohon Pembelian Obat Gusanex.
2. Sesuai point 1 (satu) diatas, pembelian obat Gusanex untuk mempercepat proses penyembuhan terhadap kuda yang sakit **pada prinsipnya dapat disetujui** dengan harga sebagai berikut :

1 Tin (kg Spray)	@ Rp. 210.000,-	Rp. 210.000,-
------------------	-----------------	---------------

Terbilang : Dua ratus sepuluh ribu rupiah
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi .

Direksi
 PERUSAHAAN DAERAH
 PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
 * PD. PEMBANGUNAN *
 Dr. H. PUTRAMA ALKHAIRI
 Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Operasional PDPKM.
2. Kabag. Pemeliharaan dan Pengawasan PDPKM.
3. Kabag. Keuangan & Akuntansi PDPKM.
4. Arsip.



LEMBAGA KONSERVASI
TAMAN MARGASATWA MEDAN
(MEDAN ZOO)



IZIN MENTERI KEHUTANAN RI. No. SK. 124 / Menhut-II / 2010
 Email : medanzoo2017@gmail.com - Facebook : Medan New Horas - IG : medanzoo2017

Medan, 14 Oktober 2019

Nomor : 694/02/PDPKM-TMM/X/2019
 L.amp. : -,-
 Hal : **Mohon Pembayaran Obat Gusanax**

Kepada Yth :
Bapak Direksi ✓
 PD. Pembangunan Kota Medan
 di-

Medan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa permohonan kami tentang pembelian obat gusanex telah disetujui direksi dengan surat no.1032/027/PDPKM/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon pembayaran atas pembelian obat tersebut.

Adapun rincian pembelian obat adalah sebagai berikut :

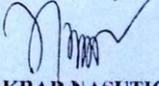
1 Tin (klg spray)	@ Rp.210.000,-	Rp.210.000,-
Total.....		Rp.210.000,-

Terbilang : (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas perhatian dan realisasi kami ucapkan terima kasih .

TAMAN MARGASATWA MEDAN
 (MEDAN ZOO)
 Tanggal 21 - 10 - 19
 Kode/Nomor: 2311/027

TAMAN MARGASATWA MEDAN
 (MEDAN ZOO)


ZAINUL AKBAR NASUTION
 Manager

Tembusan :

1. Kabag Pemeliharaan/Pengawasan PDPKM
2. Arsip

Tahun Buku
Pasal / Code

Bukti No.
Tanggal

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

TELAH DITERIMA DARI PD. PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

DI MEDAN
UANG SEBANYAK Dua ratus Sepuluh Ribu Rupiah

UNTUK Pembelian obat Gusanex di Sub Unit TMM.

KETERANGAN :
Medan, tgl 20

TERBILANG : Rp 210.000

Diketahui/Ditetujui,
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KOTA MEDAN

Setuju dibayar,

Diperbuat untuk VIII/III
Yang Membayar, Yang Menerima,

.....
Direktur Utama

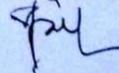
.....
Keuangan

**PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN/PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
BAGIAN PEMELIHARAAN/PENGAWASAN
PD.PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

No	Bulan	Lokasi/Unit	Jlh hari	Tanggal	Jlh Petugas	Keterangan
1	Januari	TMM & KR D	1	1	5	Libur Nasional Tahun Baru 2020
		TMM & KR D	4	5,12,19,26	4	Pengawasan rutin hari minggu
		TMM & KR D	1	25	4	Libur Nasional Tahun Baru Imlek
2	Februari	TMM & KR D	4	2,9,16,23	4	Pengawasan rutin hari minggu
3	Maret	TMM & KR D	1	25	4	Libur Nasional Hari Raya Nyepi
		TMM	5	9,10,11,12,13	5	Pemeriksaan Reguler/ LHP
			5	16,17,18,19,20	5	Penyelesaian laporan
		TMM & KR D	5	1,8,15,22,29	4	Pengawasan rutin hari minggu
		TMM & KR D	1	22	4	Libur Nasional Isra' Mi'raj
4	April	TMM & KR D	1	10	4	Libur Nasional Wafat Isa Al Masih
		TMM & KR D	4	5,12,19,26	4	Pengawasan rutin hari minggu
5	Mei	TMM & KR D	1	1	4	Libur Nasional Hari Buruh
		TMM & KR D	5	3,10,17,24,31	4	Pengawasan rutin hari minggu
		TMM & KR D	1	7	4	Libur Nasional Hari Raya Waisak
		TMM & KR D	1	21	4	Libur Nasional Kenaikan Isa Al masih
		TMM & KR D	8	24,25,26,27,28,29,30,31	5	Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri
6	Juni	TMM & KR D	1	1	4	Libur Nasional Hari Lahir Pancasila
		KRD & GR	4	7,14,21,28	4	Pengawasan rutin hari minggu
		KRD & GR	4	16,17,18,19	5	Pemeriksaan reguler/LHP
		TMM & KR D	4	22,13,24,25	5	Penyelesaian laporan

7	Juli	TMM & KR D	4	5,12,19,26	4	Pengawasan rutin hari minggu
		TMM & KR D	1	31	4	Libur Nasional Hari Raya Idul Adha
8	Agustus	TMM & KR D	1	17	4	Libur Nasional HUT R.I
		TMM & KR D	4	2,9,16,23,30	4	Pengawasan rutin hari minggu
		TMM & KR D	1	20	4	Libur Tahun Baru Islam
9	September	TMM & KR D	4	6,13,20,27	4	Pengawasan rutin hari minggu
10	Oktober	TMM & KR D	4	4,11,18,25	4	Pengawasan rutin hari minggu
		TMM & KR D	1	29	4	Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW
11	November	TMM & KR D	5	1,8,15,22,29	4	Pengawasan rutin hari minggu
12	Desember	TMM & KR D	2	25,26	4	Libur Nasional Hari Raya Natal
		TMM & KR D	4	6,13,20,27	4	Pengawasan rutin hari minggu

Medan, 26 November 2019
 Kabag Pemeliharaan/Pengawasan
 PD.Pembangunan Kota Medan



YUSUF SEBAYANG, SE
 NIK. 95.02.82

PD. PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2016

AKTIVA	CATATAN	31 Des 2017 Rp	31 Des 2016 Rp
AKTIVA LANCAR			
KAS dan SETARA KAS	01	522.812.492	1.797.129.146
PIUTANG USAHA	02	593.806.764	466.967.720
PERSILIAAN	03	98.019.654	84.314.704
AKTIVA PAJAK TANGGULIHAN PANJAR	04	5.341.247	5.341.247
JUMLAH AKTIVA LANCAR	05	<u>6.575.005</u>	<u>6.575.005</u>
AKTIVA TETAP		<u>1.626.605.333</u>	<u>2.360.327.822</u>
HARGA PEROLEHAN	06		
AKUMULASI PENYUSUTAN		168.102.645.156	187.515.229.680
NILAI BUKU		(10.656.671.118)	(8.936.100.878)
AKTIVA TAK BERWUJUD		<u>177.445.974.038</u>	<u>178.579.128.802</u>
HARGA PEROLEHAN	07		
AKUMULASI AMORTISASI		742.681.850	727.981.850
JUMLAH AKTIVA TAK BERWUJUD		<u>(486.541.907)</u>	<u>(303.506.444)</u>
AKTIVA LAIN - LAIN		<u>296.139.943</u>	<u>424.425.406</u>
PIUTANG LAIN	08		
SETORAN LABA PADA PEMKO MEDAN		13.965.000	13.965.000
JUMLAH AKTIVA LAIN - LAIN		<u>363.586.543</u>	<u>363.586.543</u>
TOTAL AKTIVA		<u>377.551.543</u>	<u>377.551.543</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>179.706.270.857</u>	<u>181.741.433.573</u>
KEWAJIBAN LANCAR			
KEWAJIBAN USAHA	09		
UANG MUKA CALON PEMERIK RUMAH	10	9.171.650	491.444.650
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	11	2.560.000	2.560.000
KEWAJIBAN PAJAK	12	1.107.085.173	927.794.445
KEWAJIBAN LAINNYA	13	7.467.237.060	7.332.485.184
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		<u>168.725.650</u>	<u>2.258.607.582</u>
EKUITAS	14	<u>8.754.719.533</u>	<u>11.012.891.841</u>
MODAL SAHAM PEMKO MEDAN			
CADANGAN DANA		192.293.993.457	192.293.993.457
DONASI		5.341.247	5.341.247
RUGI TAHUN LALU		321.000.000	321.000.000
RUGI TAHUN BERJALAN		(19.153.161.000)	(18.960.688.329)
JUMLAH EKUITAS		<u>(2.515.682.370)</u>	<u>(2.930.906.643)</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>170.951.491.324</u>	<u>170.728.541.712</u>
		<u>179.706.270.857</u>	<u>181.741.433.573</u>

Urut catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PD. PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

**LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2016**

	CATATAN	31 Des 2017 Rp.	31 Des 2016 Rp.
PENDAPATAN USAHA :			
UNIT HIBURAN	15	6.506.130.070	6.390.813.387
PERGUDANGAN KOTA TANJUNG MULIA MEDAN		3.863.252.691	3.350.021.103
RUMAH SUSUN		46.840.000	46.920.000
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		10.416.222.761	9.790.754.490
BIAYA OPERASIONAL :			
BEBAN LANGSUNG	16	8.893.864.073	9.184.303.753
BEBAN TIDAK LANGSUNG		4.060.540.428	3.579.785.882
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		12.954.410.501	12.764.089.635
LABA OPERASIONAL		(2.538.187.740)	(2.973.335.145)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
PENDAPATAN LAINNYA	17	22.505.370	51.408.718
BIAYA LAINNYA		-	(8.980.216)
JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		22.505.370	42.428.502
RUGI SEBELUM PAJAK		(2.515.682.370)	(2.930.906.643)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	18	-	-
RUGI TAHUN BERJALAN		(2.515.682.370)	(2.930.906.643)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD. PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2016**

	31 Des 2017 Rp	31 Des 2016 Rp
MODAL SAHAM PEMKO MEDAN	192.293.993.457	192.293.993.457
CADANGAN DANA	5.341.247	5.341.247
DONASI	321.000.000	321.000.000
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	192.620.334.704	192.620.334.704
RUGI DITAHAN AWAL	(21.891.792.972)	(18.994.638.675)
KOREKSI LABA/RUGI TAHUN LALU	2.738.631.962	33.752.346
RUGI TAHUN BERJALAN	(2.515.682.370)	(2.930.905.643)
RUGI DITAHAN AKHIR	(21.668.843.380)	(21.891.792.972)
JUMLAH EKUITAS	170.951.491.323	170.728.541.732

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1259/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/12/2019

Nama Mahasiswa : Ahmad Khairul Rizal

NPM : 1605170405

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Pemeriksaan

Tanggal Pengajuan Judul : 12/12/2019

Nama Dosen pembimbing^{*)} : Riva ubar Hrp, SE, Msi AS 16/12-2019

Judul Disetujui^{**)}

Peran audit internal & Pengendalian
Intern dalam meringkaskan
Good corporate Governance 9/1/2019
Ruf

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Riva Ubar Hrp, SE, Msi)

Keterangan:

*) Tata oleh Pimpinan Program Studi

**) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Sebelum diisikan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan upload ke sistem online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte perhatikan surat ini agar tidak menimbulkan
kesalah dan tanggapan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 311/TGS/IL3-AU/UMSU-05/P/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ahmad Khaiful Rizal
N P M : 1605170405
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan
Good Corporate Governance Pada PD. Pembangunan

Dosen Pembimbing : **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Januari 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rab. Awwal 1441 H
21 Januari 2020 M

Dekan *W*



Il. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 220238

Nomor :/ II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Medan, 06 Rajab 1439 H
02 Maret 2020 M

Lamp. :
Hal : **Undangan Pelaksanaan
Seminar Proposal**

Kepada Yth, Sdra/i
di,
Medan

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ba'da salam, sehubungan dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi S-1 (Strata Satu) mahasiswa :

Nama : **Ahmad Khairul Rizal**
NPM : **1605170405**
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal : Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance Pada PD Pembanguna Kota Medan

dilaksanakan pada

Hari / Tgl : **Selasa, 03 Maret 2020**
Tempat : Ruang Seminar Lt. II Gd. E
Waktu : 08.30 Wib s/d selesai

dengan tim :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Fitriani Saragih, SE, M.Si | (Ketua) |
| 2. Zulla Hanum, SE, M.Si | (Sekretaris) |
| 3. Riva Ubar Harahap, SE, M.Si | (Pembimbing) |
| 4. Elizar Sinambela, SE, M.Si | (Pembanding) |

Demikian undangan Seminar Proposal Skripsi ini kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kep. Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 03 Maret 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ahmad Khairul Rizal*
NPM. : 1605170405
Tempat / Tgl.Lahir : P. Susu, 13 Desember 1998
Alamat Rumah : Jln. Surya
Judul Proposal : Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance Pada PD Pembanguna Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>UBM lebih jelaskan KUMUSAN... Masptk...</i>
Bab II	<i>deserui kan ke pedoman landasan teori</i>
Bab III	<i>deserui kan teknik analisa data usaha penelitian</i>
Lainnya	<i>Sistematika penulisan, Daftar Pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Riva Ubar Harahap, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 03 Maret 2020 menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Khairul Rizal
NPM : 1605170405
Tempat / Tgl.Lahir : P. Susu, 13 Desember 1998
Alamat Rumah : Jln. Surya
Judul Proposal : Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance Pada PD Pembanguna Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : Riva Ubar Harahap, SE, M.Si 03.2020

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Riva Ubar Harahap, SE, M.Si

Pembanding

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, _____ H
_____ 20__ M

Kepada Yth,
Ketua Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

A	H	M	A	D	K	H	A	I	R	U	L	R	I	Z	A	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	9	0	5							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tempat Tgl. Lahir :

P	A	N	A	L	A	N	S	U	S	U	/	1	3	O	E	S	E
M	B	E	R	1	9	9	8										

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	L	S	U	R	Y	A	N	O	2	M	E	D	A	N	T	E
M	B	U	N	G												

Tempat Penelitian :

P	D	P	E	M	B	A	N	G	U	N	D	A	N				
R	O	T	A	M	E	D	A	N									

Alamat Penelitian :

J	L	S	U	T	O	M	O	N	E	A	K	A	H	A	R	E	U
R	E	C	M	E	D	A	N	T	I	M	O	R	R	O	T	A	
M	E	D	A	N													

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, MSi)

Wassalam
Pemohon

(Ahmad Khairul Rizal)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 9623001, Fax. (061) 9625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : medtan@umsu.ac.id

UMSU
 (Unggul | Cerdas | Berprestasi)
 Kita membangun surat ini agar mendapatkan
 nilai dan tanggapannya

Nomor : 137/II.3-A/UMSU-05/E/2020
 Lampiran :
 Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Medan 15 Jurn. Awal 1441 H
 11 Januari 2020 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
PD. Pembangunan Kota Medan
 Jl. Sisinga No. 4 Coklat, Kec. Medan Timur
 Di-
 Medan

Handwritten notes:
 11/01/2020
 11/01/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang study Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : **Ahmad Khairul Rizal**
 Npm : **1605170405**
 Program Studi : **Akuntansi**
 Semester : **VII (Tujuh)**
 Judul : **Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance Pada PD. Pembangunan**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


 Dekan ✓
 SE, MM, M.SE

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1711/IL3-AU/UMSU-05/F/2020 Medan, 20 Syawal 1441 H
 Lamp. : - 12 Juni 2020 M
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
PD. Pembangunan Kota Medan
 Jln. Sutomo No. 4 Gabaru, Kec. Medan Timur
 Di-
 Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

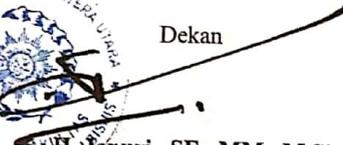
Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ahmad Khairul Rizal
 N P M : 1605170405
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance Pada PD Pembangunan Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


 Dekan
H. Hanuri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
 JASA KONSTRUKSI - PROPERTI - SARANA UMUM & PARISWASTA
 JLN. SUTOMO UJUNG NO. 2-4 TELP. 061.4150664 - 061.4511974
 FAX : 061 - 4574353, E-MAIL : pd.pembangunanmedan@gmail.com
 MEDAN 20235



Medan, 28 Januari 2020

Nomor : 095/020/PDPKM/I/2020.
 Lamp : -
 Hal : **Izin Riset Pendahuluan.**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jln. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan.
 di -
 M e d a n.

Dengan hormat,
 Membalas surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 137/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal : 11 Januari 2020
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan di PD. Pembangunan Kota Medan, pada prinsipnya dapat disetujui untuk atas nama :

N a m a : ✓ AHMAD KHAIRUL RIZAL
 NPM : 1605170405
 Jurusan : AKUNTANSI
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul : " PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN
 INTERN DALAM MENINGKATKAN GOOD
 CORPORATE GOVERNANCE PADA PD.
 PEMBANGUNAN "

Dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima Izin Riset Pendahuluan di PD. Pembangunan Kota Medan.
- b. Perusahaan tidak menyediakan fasilitas khusus, Izin ini semata-mata untuk ilmu pengetahuan dan tidak diperkenankan mempublikasikan diluar Perusahaan tanpa ada Izin dari Pihak Perusahaan.
- c. Selama mengadakan Riset yang bersangkutan diwajibkan berpakaian Rapi dan masuk pukul 08.⁰⁰ - 16.⁰⁰ wib.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan ditempatkan Pada Bagian Umum dan patuh serta bertanggung jawab kepada Kabag. Umum PD. Pembangunan Kota Medan.
- e. Setelah selesai Riset, Mahasiswa yang bersangkutan membuat laporan sebanyak 1 (satu) set untuk disampaikan kepada Direksi PD. Pembangunan Kota Medan.

Demikian disampaikan dan dimaklumi.

DIREKSI
 PERUSAHAAN DAERAH
 PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
 PD. PERSANDI

DR. SUGITO HADI, SE, M.Si
 Direktur Umum/Keuangan/SDM.

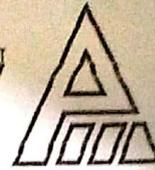
Tembusan :

1. Yth. Direktur Utama sebagai laporan;
2. Kabag. SDM PDPKM;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

MOTTO. "Medan Rumah Kita"



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
 JASA KONSTRUKSI - PROPERTI - SARANA UMUM & PARIWISATA
 JLN. SUTOMO UJUNG NO. 2-4 TELP. 061.4150064 - 061.4511974
 FAX : 061 - 4574353. E-MAIL : pd.pembangunanmedan@gmail.com
 MEDAN 20235



Medan, 09 Juli 2020

Nomor : 510 / 026 / PDPKM/VII/2020.
 Lamp : -
 Hal : **Izin Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jl. Kapten Muchtar Basri No.3
 Di -
 Medan.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU dengan nomor 1711/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Menyelesaikan Riset di PD. Pembangunan Kota Medan, pada prinsipnya dapat disetujui atas nama Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : AHMAD KHAIRUL RIZAL
 NPM : 1605170405
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern dalam meningkatkan Good Corporate Governance pada PD. Pembangunan Kota Medan.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

- Mahasiswa yang bersangkutan diberikan Izin Menyelesaikan Riset di PD. Pembangunan Kota Medan.
- Perusahaan tidak menyediakan fasilitas khusus, Riset ini semata-mata untuk Ilmu Pengetahuan.
- Selama mengadakan Riset di PD. Pembangunan Kota Medan yang bersangkutan diwajibkan berpakaian bersih & rapi, masuk pukul 08.⁰⁰ s/d 16.⁰⁰ Wib.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.


Nrs. H. RUTRANIA ALKHAIRI
 Direktur Utama.

Cc. Arsip.

MOTTO. "Medan Rumah Kita"

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 09-Juli-2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

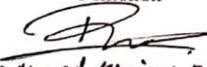
Nama Lengkap : Ahmad Khairul Rizal
 N P M : 1605170403
 Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
 Alamat : Jl. BILAL
 Judul Skripsi : Peran Audit Internal Dan Pengendalian Inter dalam meningkatkan Good Corporate Governance Pada pd pembangunan kota Medan

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhmadiyah 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon


(Ahmad Khairul Rizal)

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURL., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Ahmad Khairul Rizal
 N P M : 1605170405
 Tempat/Tgl. Lahir : Pangpalaan SUSU / 13 Des - 1998
 Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESIP
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Alamat Rumah : J. BILAL
 _____ Tel _____
 Pekerjaan/Instansi : _____
 Alamat Kantor : _____
 _____ Tel _____

Melalui surat permohonan tertanggal _____ 20____ telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 09-Juni- 20.20

Saya yang Menyatakan

Materai





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : AHMAD KHAIROL RIZAL
N.P.M : 1605170405
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Penelitian : PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN
INTERN DALAM MENINGKATKAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA PD PEMBANGUNAN MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
12-1-2020	- Pembacaan latar belakang masalah - Pembacaan identifikasi dan rumusan masalah - Pembacaan tujuan dan manfaat penelitian	R.	
31-1-2020	- Pembacaan cara pengutipan teori - Pembacaan teori tentang Good Corporate Governance. - Pembacaan kerangka berfikir	R.	
6-2-2020	- Pembacaan definisi operasional - Pembacaan cara penulisan kalimat dan cara berucap	R.	
18-2-2020	- Pembacaan daftar isi dan daftar pustaka.	R.	
	24/2/2020 <i>ke bimbingan proposal</i>		

Medan, Januari 2020

Pembimbing Proposal

(RIVA UBAR HRP, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahitad Khalrul Rizal Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170405 Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Nama Dosen Pembimbing : Riva Ubar Harahap, SE., M.Si Judul Penelitian : Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance pada PD Pembangunan Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Publiti latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah	11/04/2020	R.
Bab 2	Tarbihter teori, puitika dan puitika keorganisasian	20/04/2020	R.
Bab 3	Publiti definisi operasional	13/05/2020	R.
Bab 4	Tarbihter level dan puitika deskripsi dan puitika	18/05/2020	R.
Bab 5	Publiti ampun dan san	2/6/2020	R.
Daftar Pustaka	Tarbihter daftar pustaka	8/6/2020	R.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ASE sidang meja hijau 17/6/2020 <i>[Signature]</i>		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Medan, Juni 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si)